

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam perbuatan permufakatan jahat tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan hal ini dikarenakan pengertian baku dan unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat dalam persoalan korupsi tidak diatur dengan jelas. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sementara spesifikasi yang digunakan dalam tesis ini ialah deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tudy pustaka. Sementara metode anaalisis data yang digunakan data adalah metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penegakan hukum pada kasus permufakatan jahat terkait korupsi sat ini belum berkeadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dalam tindak pidana permufakatan jahat pada kasus korupsi sehingga penegakan hukum yang ada berdasar pada kepentingan politis, yang dimana pihak penguasa akan mampu mencari jalan keluar dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semetara pihak yang tidak memiliki otoritas kekuasaan tidak akan mampu lepas dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun kelemahan yang mengakibatkan hal itu ialah kelemahan berupa tumpeng tindih aturan, penegakan hukum yang hanya mengutamakan pembuktian berupa kerugian nyata dan mengenyampingkan *meeting of mind*, adanya pengaruh kekuasaan dan politik. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 2 dan menambahkan ketentuan Pasal 15A pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil rekonstruksi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menambahkan frasa kata “dapat” kembali dan Pasal 15A menyatakan tentang unsur-unsur permufakatan Kata Kunci jahat dalam tindak pidana korupsi yang memasukan unsur kejahatan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan dua atau lebih orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik secara terang maupun secara diam-diam (*meeting of mind*).

Kata Kunci: Efektivitas, Korupsi, Pemidanaan, Permufakatan Jahat,

ABSTRACT

Law enforcement in criminal conspiracy acts of corruption is very difficult to do, this is because the standard understanding and elements of criminal conspiracy in corruption are not clearly regulated. This thesis aims to determine and analyze the effectiveness of punishment against conspiracy to commit crimes of corruption as well as to identify and analyze the legal certainty of punishment for conspiracy in criminal acts of corruption.

The approach method used in this research is normative juridical. Meanwhile, the specifications used in this thesis are analytical descriptive. The sources and types needed in this research are secondary data. Secondary data is divided into three parts, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is literature study. While the data analysis method used is qualitative data analysis method.

Based on the research conducted, it was found the fact that the implementation of law enforcement in cases of conspiracy related to corruption is currently not fair, this is due to the unclear elements in the criminal act of conspiracy in corruption cases so that existing law enforcement is based on political interests, where the authorities will be able to looking for a way out of the snares of Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, while parties who do not have the authority to power will not be able to escape the snares of Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The weaknesses that cause this are weaknesses in the form of overlapping rules, law enforcement which only prioritizes evidence in the form of real losses and ignores meetings of mind, the influence of power and politics. So it is necessary to reconstruct Article 2 and add provisions of Article 15A of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The results of the reconstruction of Article 2 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is to add the word "can" again and Article 15A states about the elements of conspiracy. commit criminal acts of corruption, both openly and secretly (meetings of mind).